

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 71/ITJ.4/TU.210/IV/2026

Yth : Inspektur Jenderal KKP
Dari : Inspektur IV
Hal : Laporan Kinerja Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 20 April 2026

Dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah disusun Laporan Kinerja Interim sebagai salah satu bentuk pengendalian atas perkembangan capaian kinerja Inspektorat IV Tahun 2026 dan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat IV dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern KKP selama Triwulan I Tahun 2026.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Inspektorat IV bertanggung jawab untuk mewujudkan 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja, dan target capaian kinerja Triwulan I Inspektorat IV Tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja. Hasil pengukuran Indikator Kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja <https://kinerjaku.kkp.go.id/> diketahui bahwa untuk periode triwulan I tahun 2026, Inspektorat IV memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** sebesar **105,53%** atau kategori **“Baik”**. Capaian kinerja Inspektorat IV Triwulan III Tahun 2025 antara lain: 1) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV mencapai nilai 95,51% dari target 86%; dan 2) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV sebesar 100% dari target 100%.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Inspektorat IV Triwulan I TA 2026 dari pagu efektif mencapai Rp 932.253.969,00 atau 15,43% dari alokasi anggaran Rp 6.042.814.000,00. Adapun uraian atas capaian tersebut secara rinci pada Laporan Kinerja Inspektorat IV periode Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Zaki Mubarak

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026 INSPEKTORAT IV



INSPEKTORAT JENDERAL
KKP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat IV Triwulan I TA 2026 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Inspektorat IV Triwulan I TA 2026 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja setelah melalui pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat IV di Triwulan I TA 2026.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi capaian kinerja secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian kinerja Inspektorat IV dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Kami berharap kritik dan saran membangun untuk meningkatkan peran dan mutu Inspektorat IV dalam hal penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan pemberian advis (*Advisory Services*) pada pelaksanaan program dan kegiatan mitra kerja untuk mendukung peran Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai Katalisator Pembaharuan Kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, 20 April 2026



Ditandatangani
Secara Elektronik

Zaki Mubarak

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat IV menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat IV berupaya untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Itjen Tahun 2026 adalah Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan intern. Keberhasilan program tersebut didukung melalui pencapaian kinerja pada Inspektorat IV yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV dan Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Inspektorat IV dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian kinerja Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026 mendapatkan predikat Baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 105,53% (Baik) dengan rincian dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan yang diukur pada Triwulan ini, 1(satu) IKU tercapai sesuai target (100%), dan 1 (satu) IKU tercapai melebihi target (>100%).

Capaian kinerja Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026 antara lain: 1) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV mencapai nilai 95,51% dari target 86%; dan 3) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV sebesar 100% dari target 100%.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Inspektorat IV Triwulan I TA 2026 dari pagu efektif mencapai Rp 932.253.969,00 atau 15,43% dari alokasi anggaran Rp 6.042.814.000,00 .

Dalam pencapaian kinerja Inspektorat IV selama Triwulan I Tahun 2026 Tidak ditemukan kendala/permasalahan yang dapat mempengaruhi capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja karena Inspektorat IV telah melakukan upaya-upaya dalam optimalisasi pengelolaan kinerja dan anggaran sesuai dengan perkembangan kebijakan.

.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. AGENDA INSPEKTORAT IV.....	3
E. SUMBER DAYA	5
F. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA	6
G. RUANG LINGKUP	6
H. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	7
I. SISTEMATIKA LAPORAN	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2025 - 2029	8
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	10
C. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT IV TAHUN 2025	10
D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT IV	10
E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT IV	12
B. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT IV	12
C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN.....	24
D. EVALUASI RENCANA AKSI	26
BAB IV PENUTUP	27
A. KESIMPULAN	27
B. PERMASALAHAN	27
C. SARAN PERBAIKAN	27
D. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN KINERJA SEBELUMNYA	28
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat IV Triwulan I TA. 2026	5
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2026.....	10
Tabel 3 Penilaian Capaian Kinerja	12
Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat IV Triwulan I TA. 2026.....	13
Tabel 5 Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV	17
Tabel 6 Perkembangan Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV	17
Tabel 7 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat IV TA. 2026.....	6
Gambar 2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat IV Triwulan I TA. 2026.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Itjen KKP sebagai bagian integral dari KKP sebagai unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen memiliki mandat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang KP agar sesuai dengan rencana dan tujuan serta sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*). Dengan peran strategis tersebut, Itjen KKP dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan pengawasan intern secara profesional dan berkualitas.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Itjen KKP, Inspektorat IV selaku salah satu unit pelaksana kinerja Itjen KKP melakukan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik melalui mekanisme pelaporan kinerja untuk memastikan perkembangan capaian kinerja sesuai dengan harapan selanjutnya menjadi dasar pengambilan kebijakan atau aksi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang bertujuan untuk memberikan informasi atas berbagai capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas/fungsi selama satu tahun. Pelaporan kinerja dilakukan dengan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

B. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat IV melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan DIPA sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026 Nomor: SP DIPA-032.02.1.622098/2026 tanggal 19 November 2025.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PDSPKP, dan unit pelaksana teknis pada BPPMHKP dan Ditjen PDSPKP. Secara lebih rinci, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP;
3. Pengawasan Intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan, melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP;
4. Koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Pelaporan Hasil Pengawasan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat IV.

D. AGENDA INSPEKTORAT IV

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional, sehingga dijadikan salah satu agenda pembangunan nasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti pelanggaran disiplin,

penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Itjen KKP melaksanakan agenda pembangunan nasional yang berupa Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara. Dalam mendukung agenda tersebut, Inspektorat IV melaksanakan agenda sebagai berikut:

1. Pengawasan Kinerja Pembangunan KP pada mitra Inspektorat IV:
 - Evaluasi Pengelolaan PNBP dan Tata Kelola Perizinan.
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas KP:
 - a. Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP);
 - b. Pembangunan Sentra Kuliner Ikan;
 - c. Pembangunan Pasar Ikan Bersih;
 - d. Pembangunan Pabrik Es;
 - e. Pembangunan Gudang Beku Portable;
 - f. Pengadaan Peralatan Pengolahan;
 - g. Pengadaan Kendaraan Berpendingin;
 - h. Pengadaan Peralatan Pemasaran;
 - i. Implementasi Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen;
 - j. Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor;
 - k. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI;
 - l. Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - m. Pengadaan Peralatan Laboratorium Mutu; dan
 - n. Tindak Lanjut Rekomendasi DG Sante (Uni Eropa).
3. Pengawasan Mandatori:
 - a. Reviu Laporan Keuangan;
 - b. Reviu Laporan Kinerja;
 - c. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
 - d. Evaluasi Penyusunan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2026 dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- e. Evaluasi implementasi SAKIP;
 - f. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan;
 - g. Reviu RKA-K/L Tahun 2026;
 - h. Evaluasi Pelayanan Publik;
 - i. Reviu Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2027;
 - j. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK); dan
 - k. Reviu Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
4. Pengawasan Tematik
- a. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen dan BPK-RI;
 - b. Evaluasi Pemanfaatan BMN;
 - c. Evaluasi Pengelolaan BMN;
 - d. Evaluasi Kepegawaian;
 - e. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - f. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko;
 - g. Evaluasi Telaah Sejawat Internal;
 - h. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan BMN; dan
 - i. Evaluasi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PBJ.

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia

Inspektorat IV dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 30 pegawai dengan rincian disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat IV Triwulan I TA. 2026

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Inspektur IV	1
2.	Auditor Utama	2
3.	Auditor Madya	5
4.	Auditor Muda	6
5.	Auditor Pertama	7
6.	Auditor Pelaksana	1
7.	Kepala SubBagian Tata Usaha	1
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	1
9.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	1
10.	Perencana Pertama	1
11.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1
12.	Pengelola Surat	1
13.	PJLP	1
Jumlah		29

Struktur Organisasi Inspektorat IV disajikan pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat IV TA. 2026

2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan dan dukungan operasional pengawasan, Inspektorat IV TA. 2026 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp6.042.814.000,00 yang merupakan kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan

F. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja Inspektorat IV sampai dengan Triwulan IV Tahun 2026 sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
2. Menilai dan mengevaluasi upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja Inspektorat IV.

G. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat IV dan Rencana Aksi Kinerja yang diukur pada Tahun 2026. Untuk pengukuran Triwulan I Tahun 2026 ini ruang lingkup pengukurannya adalah kinerja Inspektorat s.d. 31 Maret 2026 dan rencana aksi kinerja Inspektorat IV s.d. 31 Maret 2026.

H. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Inspektorat IV berdasarkan Penetapan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2026 khususnya s.d. Triwulan I Tahun 2026;
2. Pengukuran atas Rencana Aksi pencapaian IKU Inspektorat IV Tahun 2026, khususnya s.d. Triwulan I Tahun 2026.

I. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

1. Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, Agenda Inspektorat IV, Sumber Daya, Tujuan Pengukuran Kinerja, Ruang Lingkup, Metodologi Pengukuran Kinerja dan Sistematika Laporan;
2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP Tahun 2025 – 2029, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2026, Program dan Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV dan Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja;
3. Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Pengelolaan Kinerja Inspektorat IV, Capaian Kinerja Inspektorat IV, Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Evaluasi Rencana Aksi s.d. Triwulan I Tahun 2026; dan
4. Penutup yang mencakup kesimpulan, permasalahan, rekomendasi dan tindak lanjut rekomendasi.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2025 - 2029

Pada prinsip penjenjangan kinerja, Rencana Strategis Kementerian merupakan dasar atau acuan bagi unit Eselon I dalam menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam hal ini, Itjen selaku APIP mendukung Rencana Strategis KKP melalui program/kegiatan pengawasan intern. Pada periode Triwulan I ini, perencanaan jangka menengah di level Kementerian dan unit Eselon I di bawahnya masih dalam proses penyusunan.

Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029 dan turunannya pada Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dengan visi tersebut proses pembangunan dilakukan secara bersama melalui kerja sama seluruh elemen bangsa yang memiliki kesamaan tekad untuk memajukan Indonesia menjadi setara dengan negara maju dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP mempunyai visi :

“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan”

Visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:

- a. Memberikan Pengawasan Intern Terbaik Untuk Peningkatan Kinerja KKP;***
- b. Mendorong Pengendalian Intern Yang Efektif Terhadap Sistem dan Tata Kelola KKP;***
- c. Mendorong Terwujudnya Sumber Daya Aparatur KKP Yang Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan Prima.***

Dalam misi tersebut, komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program nasional KKP antara lain: Revitalisasi Kawasan Tambak, Kampung Nelayan Modern, Dukungan Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Program yang Mendukung Kebijakan *Blue Economy*. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

- 1. Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan Kementerian KKP;***
- 2. Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Lingkungan KKP; dan***
- 3. Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan KKP.***

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut diindikasikan dengan capaian Sasaran Kinerja.

4. Sasaran Kegiatan

Sebagai unit pengawasan intern, Itjen KKP mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui dua Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

- 1. Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV;

2. Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen tahun 2026, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern pada Mitra dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.042.814.000,00 yang merupakan kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

C. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT IV TAHUN 2026

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja Itjen, Inspektorat IV selaku unit pelaksana pengawasan internal pada Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP mendapatkan tanggung jawab untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dan telah ditetapkan target Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2026 yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1.	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	1.	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 0,5
		2.	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86,5
		3.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86
		4.	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4
2.	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	5.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)	85,5
		6.	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV (%)	82
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)	100

Perjanjian kinerja Inspektorat IV Tahun 2026 dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja antara Inspektur IV dan Inspektur Jenderal KKP disajikan pada Lampiran 1.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT IV

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam

beberapa komponen kegiatan, yaitu:

1. Audit Operasional;
2. Reviu Laporan Keuangan;
3. Reviu RKA-K/L (Penganggaran);
4. Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
5. Reviu Laporan Kinerja;
6. Evaluasi PNBP;
7. Evaluasi Maturitas SPIP;
8. Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
9. Pengawasan Pertanggungjawaban Keuangan;
10. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen dan BPK-RI;
11. Pemantauan Tindak Lanjut Rencana Aksi RB;
12. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan;
13. Pemantauan Tindak Lanjut Penanganan Benturan Kepentingan;
14. Pengawasan Manajemen Risiko;
15. Pengawasan SAKIP;
16. Pengawasan pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis;
17. Pengawasan Pengelolaan BMN; dan
18. Pengawasan PBJ.

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Itjen KKP telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja .

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja Itjen KKP dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Pencapaian Target Indikator Kinerja Tahun 2026 disajikan pada Lampiran 2.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT IV

Pengelolaan kinerja merupakan sistem manajemen yang dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim pengelola kinerja Inspektorat IV melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala (Triwulan). Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi). Tingkat penilaian capaian kinerja disajikan pada Tabel 3 berikut:

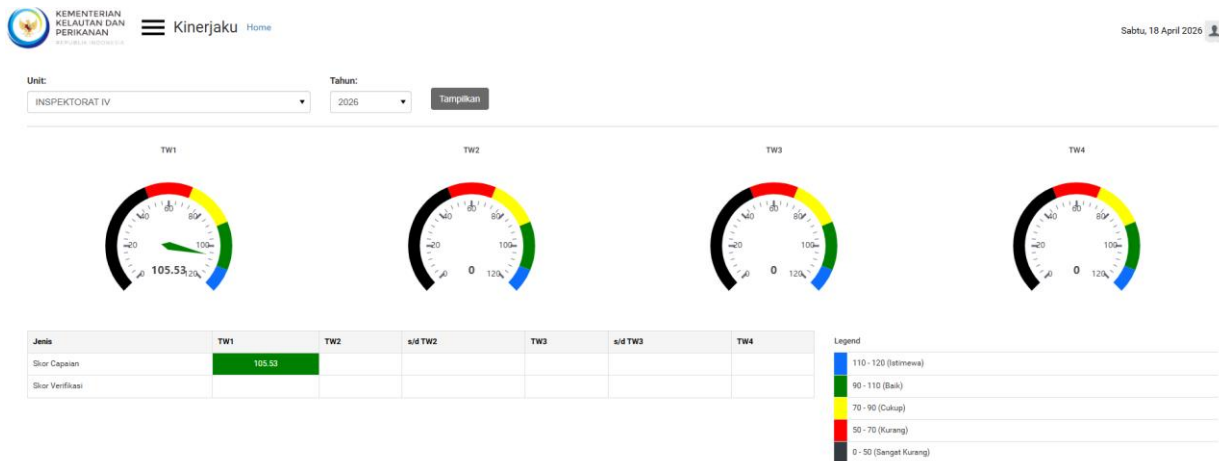
Tabel 3 Penilaian Capaian Kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

B. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT IV

Capaian kinerja Interim Triwulan I Inspektorat IV TA 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat IV yang dilaksanakan dari bulan Januari s.d. Maret 2026 yang terdiri dari 2 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 2 (dua) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Triwulan I TA 2026.

Berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*), Capaian kinerja Inspektorat IV Triwulan I TA 2026 disampaikan sebagaimana pada Gambar berikut:



Gambar 2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat IV Triwulan I TA. 2026

Berdasarkan pada Gambar di atas, Nilai Kerja Organisasi (NKO) yang didapatkan Inspektorat IV pada Triwulan I TA 2026 adalah sebesar **105,53% (kategori Baik)**. Secara rinci capaian indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat IV disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat IV Triwulan I TA. 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Target TW I	Realisasi (%)	Capaian (%)		Keterangan
						Riil	Aplikasi	
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤0,5	-	-	-	-	Diukur pada Triwulan III
	2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86,5	-	-	-	-	Diukur pada Triwulan IV
	3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86	86	95,51	111,06	111,06	
	4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4	-	-	-	-	Diukur pada semester I dan II
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)	85	-	-	-	-	Diukur pada Triwulan II
	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV (%)	80	-	-	-	-	Diukur pada semester I dan II
	7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100	

Berdasarkan aplikasi kinerja yang diperoleh dari nilai Sasaran Kinerja, yaitu:

1. SK.01 Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV, dengan capaian 111,06%; dan
2. SK.02 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV, dengan capaian 100,00%.

Penjelasan hasil pengukuran Indikator Kinerja periode Triwulan I TA. 2026 adalah sebagai berikut:

SK-1 Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV

Sasaran Kegiatan Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV ditetapkan sebagai tolok ukur manfaat (outcome) yang diharapkan dapat dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen sebagai APIP dengan fokus pada peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan KKP. Tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam setiap program/kegiatan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Sesuai dengan fungsinya, Inspektorat IV menjadikan Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra sebagai Sasaran kegiatan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sejalan dengan PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menerangkan bahwa salah satu fungsi APIP adalah Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya Inspektorat IV dalam mendorong terwujudnya Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra diukur dan dipertanggungjawabkan melalui capaian 4 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana berikut.

IK 1 - Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV adalah jumlah nilai temuan keuanganeva; (nilai Tuntutan Ganti Rugi)

dari hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Unit Eselon I (mitra) Tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2025 (mitra). Realisasi IKU ini menggunakan nilai temuan keuangan atas hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun, sehingga frekuensi pengukuran IKK ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi Minimize (semakin kecil lebih baik). Target IK 1 tahun 2026 adalah $\leq 0,5\%$ dan diukur secara tahunan (Triwulan III).

IKU ini akan dilakukan pengukuran pada Triwulan III dan terdapat upaya yang akan dilakukan oleh Inspektorat IV dalam pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya:

1. Reviu Laporan Keuangan;
2. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran;
3. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ);
4. Pengawasan PBJ, diantaranya:
 - a. Pembangunan Sentra Kuliner Ikan;
 - b. Pembangunan Pasar Ikan Bersih;
 - c. Pembangunan Pabrik Es;
 - d. Pembangunan Gudang Beku Portable;
 - e. Pengadaan Peralatan Pengolahan;
 - f. Pengadaan Kendaraan Berpendingin;
 - g. Pengadaan Peralatan Pemasaran
5. Pengawasan BMN, diantaranya:
 - a. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
 - b. Evaluasi Penggunaan BMN
 - c. Pendampingan Pelaksanaan BMN
 - d. Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI;
6. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan;
7. Audit Operasional;
8. Evaluasi PNBP.

IK 2 – Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)

Indikator Kinerja Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Mitra Inspektorat IV bertujuan agar Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan

akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan mitra Inspektorat IV.

Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi lingkup PDSPKP dan BPPMHKP berdasarkan persentase realisasi rencana aksi RB mitra yang telah ditetapkan. Pengukuran Indikator Kinerja ini dinilai berdasarkan perbandingan antara Rencana Aksi RB Mitra Tahun 2026 yang terlaksana dengan Rencana Aksi RB Mitra Tahun 2026.

Pada tahun 2026, Inspektorat IV menetapkan target Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup PDSPKP dan BPPMHKP sebesar 86,5% yang diukur secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2026. Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP adalah melakukan pengawasan secara berkala atas rencana aksi RB KKP Tahun 2026 yang telah ditetapkan.

IK 3 - Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah tuntas) sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 oleh unit eselon I Mitra Inspektorat yang menjadi objek pengawasan dan pengukuran dengan target 86%.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 582/ITJ.0/TU.140/IV/2026 perihal Capaian IKU “Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2026” (Lampiran 3: Dokumen Pendukung Pengelolaan Kinerja Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026), realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV Triwulan I TA. 2026 adalah sebesar 95,51% (tuntas 170 dari 178 rekomendasi) dari target 86% atau tercapai 111,06% dari target. Secara rinci, realisasi pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan Itjen per unit mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel berikut

Tabel 5 Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV

No	Unit Kerja	Target (%)	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Ditjen PDSPKP	86	28	25	89,29	103,82
2	BPPMHKP	86	150	145	96,67	112,40
Total		86	178	170	95,51	111,06

Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan sebelumnya maka realisasi disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6 Perkembangan Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	TW I 2025	TW II 2025	TW III 2025	TW IV 2025	TW I 2026
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV	99,52	95,51	93,36	91,94	95,51

Secara umum capaian Indikator Kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV telah tercapai, dengan capaian Triwulan I TA.2026 sebesar 95,51% dan telah melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 86%. Kondisi tersebut disebabkan cukup banyak rekomendasi manajerial yang telah ditindaklanjuti oleh mitra Inspektorat IV. Walaupun demikian, tetap akan dilakukan pemantauan tindak lanjut untuk sisa temuan yang belum tuntas.

Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja jika dibandingkan dengan capaian inspektorat I, II, III maupun V dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup KKP" Periode Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	39	39	100,00%	0	0,00%
2	Ditjen PK	103	88	85,44%	15	14,56%
3	Ditjen PRL	2	2	100,00%	0	0,00%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	84	63	75,00%	21	25,00%
5	Ditjen PSDKP	73	73	100,00%	0	0,00%
6	Ditjen Perikanan Budi Daya	118	115	97,46%	3	2,54%
7	BPPSDMKP	49	49	100,00%	0	0,00%
8	Ditjen PDSPKP	28	25	89,29%	3	10,71%
9	BPPMHKP	150	145	96,67%	5	3,33%
10	Itjen	5	5	100%	0	0,00%
TOTAL		651	604	92,78%	47	7,22%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat terlihat bahwa capaian inspektorat IV sebesar 95,51% berada diatas rata-rata capaian mitra secara keseluruhan, yaitu sebesar 92,78%. Hal ini disebabkan oleh mitra Inspektorat IV telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang telah diberikan oleh inspektorat IV yang kemudian dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja organisasinya.

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU 3 antara lain Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen terhadap mitra dan Koordinasi/Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan baik secara internal maupun eksternal Itjen KKP dan percepatan pemantauan tindak lanjut secara elektronik melalui aplikasi SIDAK.

IK 4 - Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)

Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV merupakan jumlah rekomendasi Inspektorat IV yang diberikan kepada seluruh mitra yang menjadi objek pengawasan dapat berupa kajian yang berisi saran untuk melakukan perubahan/penambahan/penyempurnaan pada penyusunan dan/atau pelaksanaan peraturan, pedoman program/kegiatan, rencana kinerja, rancangan kerja sama aktivitas strategis, dan kebijakan dalam bentuk lainnya. Melalui rekomendasi perbaikan kebijakan ini, Inspektorat IV sebagai *advisory service* sebagai upaya untuk penguatan tata kelola pelaksanaan program/kegiatan mitra. Target IKU Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2026 adalah 4 rekomendasi yang diukur secara semesteran. Pengukuran capaian kinerja akan dilakukan pada Triwulan II dan Triwulan IV dan dilakukan berdasarkan kajian yang telah diberikan Inspektorat IV kepada mitra kerja.

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV adalah secara aktif memberikan masukan atas perubahan/penambahan/penyempurnaan pada penyusunan dan/atau pelaksanaan peraturan, pedoman program/kegiatan, rencana kinerja, rancangan kerja sama aktivitas strategis, dan kebijakan dalam bentuk lainnya pada mitra Inspektorat IV.

SK-2 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat IV

Pengawasan intern yang handal merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sebuah manajemen organisasi, pengawasan intern memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Beberapa fungsi utama pengawas intern dalam organisasi yaitu:

1. Mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan tujuan;
2. Mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*);
3. Melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran peraturan dan norma; dan
4. Mendorong implementasi kebijakan pemerintah/nasional sesuai dengan sasaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV, diperlukan suatu ukuran-ukuran yang dapat menggambarkan kualitas dari pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan kepada mitra Inspektorat IV. Karena itu, Inspektorat IV menetapkan “Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat IV” sebagai sasaran Kegiatan kedua sebagai ukuran kualitas pengawasan yang diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

IKK 5 – Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)

Telaah Sejawat adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Inspektorat lain lingkup itjen KKP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit sesuai dengan standar pengawasan intern. Nilai telaah sejawat inspektorat diperoleh dari hasil kegiatan telaah sejawat antar inspektorat lingkup itjen yang dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan kerangka penilaian yang disepakati. Telaah Sejawat Internal dilaksanakan secara berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar serta mengevaluasi kualitas pengawasan, meningkatkan kapabilitas dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai tambah kegiatan pengawasan. Target IKU ini pada tahun 2026 adalah sebesar 85,5 yang diukur secara tahunan pada Triwulan II.

Keberhasilan capaian kinerja ini akan didukung oleh kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern yang dinilai, yaitu:

1. Standar Atribut yang terdiri dari aspek independensi dan objektivitas auditor, dan kecakapan dan kecermatan profesional auditor.peningkatan kopetensi Auditor; dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Standar Kinerja yang terdiri dari aspek pengelolaan pengawasan intern,perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut, dan komunikasi penerimaan risiko.

IKK 6 - Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%)

Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%) merupakan sebuah ukuran dari implementasi pemanfaatan sistem informasi dalam membantu dan mendukung tugas pelaksanaan pengawasan intern oleh unit kerja lingkup Itjen KKP. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Inspektorat diukur berdasarkan tingkat pemanfaatan aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) dalam hal kepatuhan penyampaian (upload) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) (bobot 50%) serta tingkat pemanfaatan aplikasi SIDAK dalam hal kepatuhan dalam hal input data hasil pengawasan (bobot 50%).

Pengukuran capaian IKU dilaksanakan secara semesteran dan capaian kinerja yang berdasarkan pemanfaatan aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) pada Triwulan II dan Triwulan IV tahun 2026 Keberhasilan capaian kinerja ini akan didukung oleh efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja ini melalui kepatuhan penyampaian (upload) laporan hasil kegiatan sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan pada periode waktu pengukuran.

IKU 7 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Lingkup Inspektorat IV merupakan suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat dijalankan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja dilakukan setiap Triwulan terhadap kepatuhan dalam hal kesesuaian format dan ketepatan waktu pelaksanaan aktivitas pengelolaan kinerja dan anggaran dengan

rincian per Triwulan untuk Triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian dokumen kinerja pada e-Riviu SAKIP KemenPANRB (bobot 20%);
2. Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025 (bobot 20%);
3. Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2025 (bobot 20%);
4. Pengisian data rencana kinerja Tahun 2026 pada aplikasi pengelolaan kinerja (bobot 20%);
5. Tersedianya LPJ Keuangan Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2026 (bobot 20%); dan
6. Rekapitulasi realisasi PKPT lingkup Inspektorat periode Triwulan I.

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan hasil verifikasi oleh Sekretariat Itjen diketahui bahwa Inspektorat IV telah memenuhi seluruh dokumen pengelolaan kinerja dan anggaran dengan dengan capaian sesuai target 100,00%. Data dukung capaian IKU 7 dapat dilihat pada Lampiran 3 (Dokumen Pendukung Pengelolaan Kinerja Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026).

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target (realisasi kinerja Triwulan I 2026, target Triwulan I 2026, realisasi Triwulan I 2025 dan target tahun 2026).

Tabel 7 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV

Indikator Kinerja	Triwulan I 2026			Triwulan I 2025		Tahun 2026		
	T	R	%	R	%	T	R	%
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100,00	100	100,00	100	100	100,00

Data di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja periode Triwulan I tahun 2026 sebesar 100% (100,00%), jika dibandingkan periode Triwulan I tahun 2025 sebesar 100% tidak mengalami penurunan maupun peningkatan karena telah sesuai target. Apabila realisasi Triwulan I tahun 2026 dibandingkan target tahun 2026 dengan target 100%, telah tercapai sesuai target.

Jika dibandingkan dengan capaian Inspektorat I, II, III dan V yang juga memiliki IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran, seluruh inspektorat memiliki nilai capaian yang sama yaitu sebesar 100%. Hal tersebut disebabkan oleh seluruh inspektorat telah patuh dalam memenuhi kesesuaian format dan ketepatan waktu pelaksanaan aktivitas pengelolaan kinerja dan anggaran pada Triwulan I.

Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh efektifitas dalam pelaksanaan

kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja ini melalui penyampaian dokumen kinerja pada e-Riviu SAKIP KemenPANRB, penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2025, penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2025, pengisian data rencana kinerja Tahun 2026 pada aplikasi pengelolaan kinerja, tersedianya LPJ Keuangan Triwulan I (Januari – Maret) Tahun 2026, dan tersedianya rekapitulasi realisasi PKPT lingkup Inspektorat periode Triwulan I

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU tersebut adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran dan kegiatan lingkup Inspektorat IV secara berkala (Triwulan).

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Tahun 2026 Inspektorat IV memperoleh pagu anggaran sebesar Rp6.042.814.000,00 yang merupakan kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan pemantauan pada Aplikasi SAKTI, diketahui capaian anggaran Inspektorat IV sampai dengan bulan Maret 2026 yaitu sebesar Rp 932.253.969,00 atau sebesar 15,43%, sehingga sisa anggaran efektif sebesar Rp 5.110.560.031,00 atau sebesar 84,57%.

2. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisien, dan efektif. Pada proses pengukuran, indikator efektivitas dalam *value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisien lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Kriteria yang digunakan untuk mengukur *value for money* adalah:

1. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi dapat meminimalisir sumber daya anggaran yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif;
2. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan; dan
3. Efisiensi: pencapaian output yang optimal dengan penggunaan sumber daya anggaran seminimal mungkin. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi *output* dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada kriteria di atas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat IV telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ekonomis

Pengelolaan anggaran Inspektorat IV telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja Inspektorat IV yang direviu oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan, Inspektorat IV menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Inspektorat IV diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM kualitas terbaik dengan biaya sekecil mungkin.

2. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja Triwulan I TA 2026, dari 7 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan, sebanyak 1 Indikator Kinerja Kegiatan dapat dicapai melebihi target dan 1 Indikator Kinerja Kegiatan lainnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, nilai rata-rata pencapaian sasaran dan target kinerja Inspektorat IV TA. 2026 yang ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 105,53% atau diatas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran Inspektorat IV terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan, auditor dan beserta tim pengelola kinerja Inspektorat IV.

D. EVALUASI RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu. Setiap indikator kinerja disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai. Untuk mencapai target indikator kinerja, dapat dilaksanakan langkah-langkah pencapaian target indikator kinerja kegiatan dijabarkan yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Aksi.

Rencana aksi tersebut disajikan dalam jenis kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik (Triwulanan) sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sampai dengan Triwulan I TA 2026 dapat disampaikan bahwa seluruh rencana aksi atau kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian target kinerja Inspektorat IV dapat dilaksanakan seluruhnya. Secara rinci realisasi rencana aksi pencapaian target indikator kinerja Inspektorat IV Tahun 2026 disajikan pada Lampiran 4.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian kinerja Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026 mendapatkan predikat Baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 105,53% (Baik) dengan rincian dari 2 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan yang diukur pada Triwulan ini, 1 IKU tercapai sesuai target (100%), dan 1 IKU tercapai melebihi target (>100%).
2. Capaian kinerja Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026 antara lain:
 - a. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV mencapai nilai 95,51% dari target 86%; dan
 - b. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV sebesar 100% dari target 100%.
3. Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Inspektorat IV Triwulan I TA 2026 dari pagu efektif mencapai Rp932.253.969,00 atau 15,43% dari alokasi anggaran Rp6.042.814.000,00.

B. PERMASALAHAN

Tidak ditemukan kendala/permasalahan berarti yang dapat mempengaruhi capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja yang dilakukan pengukuran pada Triwulan I TA. 2026 karena Inspektorat IV telah melakukan upaya-upaya dalam optimalisasi pengelolaan kinerja dan anggaran sesuai dengan perkembangan kebijakan.

C. SARAN PERBAIKAN

Saran perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan kinerja Inspektorat IV dengan:

1. Melaksanakan kegiatan pada rencana aksi IKU yang belum dilaksanakan pada Triwulan berikutnya; dan

2. Melakukan penyesuaian terhadap kegiatan dalam rencana aksi pencapaian IKU.

D. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Pada Laporan Kinerja Tahun 2026 terdapat 1 (satu) saran perbaikan berupa melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan berbasis risiko dengan fokus pada program prioritas nasional dan KKP, dan telah dilakukan tindak lanjut berupa pengusulan kegiatan PKPT Tahun 2026 kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal pada bulan September sesuai dengan Nota Dinas Inspektur IV Nomor 58/ITJ.4/RC.210/III/2026, hal Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA 2026 Lingkup PDSPKP dan BPPMHKP pada tanggal 06 Maret 2026.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAR www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febry Budianto

Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ade Tajudin Sutiawarman

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Inspektur Jenderal



Ade Tajudin Sutiawarman

PIHAK PERTAMA
Inspektur IV



Febry Budianto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT IV**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86,5
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)	85,5
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV (%)	82
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)	100

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan	6.042.814.000
Total Anggaran Inspektorat IV Tahun 2026		6.042.814.000

Jakarta, 12 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Inspektur Jenderal


Ade Tajudin Sutiawarman

PIHAK PERTAMA
Inspektur IV


Febry Budianto

Lampiran 2.

Rencana aksi Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tautan: <https://bit.ly/RencanaAksiIT42026>

Lampiran 3.

Dokumen Pendukung Pengelolaan Kinerja Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tautan: <https://bit.ly/DatadukungLKjTWI2026IT4>

Lampiran 4.

Evaluasi Rencana aksi Inspektorat IV Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana terlampir pada tautan: <https://bit.ly/EvaluasiRenaksiIT42026>